

**IMPLEMENTASI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI USAHA BERSAMA UNTUK
KEBERLANJUTAN PRODUKSI PUPUK ORGANIK DI NAGARI KOTO
TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



PITRI ANDINI

21042188

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peran Pemangku Kepentingan Dalam
Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama Untuk
Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik Di Nagari Koto
Tinggi

Nama : Pitri Andini

TM/NIM : 2021/21042188

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

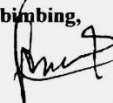
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Oktober 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 28 Oktober Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Implementasi Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan
Kelompok Tani Usaha Bersama Untuk Keberlanjutan Produksi Pupuk
Organik Di Nagari Koto Tinggi**

Nama : Pitri Andini
TM/NIM : 2021/21042188
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

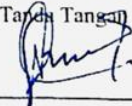
Padang, 5 November 2025

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D

1. 

Anggota : Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si

2. 

Anggota : Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A

3. 



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pitri Andini
TM/NIM : 2021/21042188
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama Untuk Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik Di Nagari Koto Tinggi” Adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 November 2025

Saya yang menyatakan,



Pitri Andini
21042188

ABSTRAK

Nama : Pitri Andini

Judul : Implementasi Peran Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama untuk Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik di Nagari Koto Tinggi

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) untuk mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik di Nagari Koto Tinggi. Fokus penelitian diarahkan pada keterlibatan pemerintah nagari, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar, Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, serta pihak swasta dalam mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, dan pengembangan pemasaran pupuk organik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberlanjutan produksi pupuk organik sebagai strategi mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik. Meskipun program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) telah memberikan dasar dukungan, kelompok tani masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan pelatihan teknis, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap para pemangku kepentingan dan anggota kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan lebih banyak terfokus pada penyaluran bantuan awal, sementara pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan masih terbatas. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sarana produksi, kemitraan pemasaran, dan dukungan program pemerintah. Adapun faktor penghambat mencakup lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya penyuluh, dan belum adanya kebijakan lanjutan di tingkat nagari. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan yang terstruktur untuk memperkuat kapasitas kelompok dan mendorong keberlanjutan produksi pupuk organik.

Kata kunci: pemangku kepentingan, pemberdayaan, kelompok tani, pupuk organik, keberlanjutan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama untuk Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik di Nagari Koto Tinggi”. Shalawat berserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri taulan bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T.,M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. dan Dr. Zikri Alhadi, S.IP.,MA. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Ibu Vitri Lides, S.TP selaku Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sekaligus pemeriksa pupuk dan pestisida Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini
8. Bapak Doni Alexsander selaku Koordinator BPP Kecamatan Koto Besar yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini

9. Bapak Hendri selaku Wali Nagari Koto Tinggi yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini
10. Bapak Andika selaku Staf Pemasaran CV Agro Jujuhan Lestari yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini
11. Bapak Mauludin selaku Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan informasi, serta membantu kelancaran proses penelitian ini.
12. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Erdiman dan Ibu Jasmi, atas segala kasih sayang, doa tulus, serta pengorbanan yang tak menjadi sumber kekuatan terbesar yang mengiringi setiap langkah penulis hingga mencapai titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta, penghormatan, dan terima kasih yang tulus atas segala pengorbanan dan kasih sayang Bapak dan Ibu yang tiada batas.
13. Kepada saudara tercinta Uni Rahma Devi, Uni Sepdi Yanti, kak Diana Putri dan abang Guspi Yandi dan keluarga atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan sepanjang proses penyelesaian studi ini.
14. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan (Buk Jiji, Hasna, Uul, Fazrul, Vigo, Riski, Ori, Riyan, Akbar, Rido), Adik kos tercinta (Tayo) dan istimewa (Mhd Zidni Iلمان) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama menempuh pendidikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padang, 19 Oktober 2025

Pitri Andini
21042188

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Konsep Peranan	15
2. Pemangku Kepentingan	18
3. Pemberdayaan	25
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Temuan Umum.....	42
1. Gambaran Umum Nagari Koto Tinggi	42
2. Profil Kelompok Tani Usaha Bersama.....	49
B. Temuan Khusus	53
1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama	53
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama	72
C. Pembahasan.....	89
1. Peranan pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama	89
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	110
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pencairan dana UPPO kelompok Tani Usaha Bersama	3
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	37
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Jorong	43
Tabel 4. 2 Ketinggian Nagari Dari Permukaan Laut.....	44
Tabel 4. 3 Jumlah dan Penyebaran Penduduk.....	44
Tabel 4. 4 Penyebaran Kepala Keluarga	45
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender.....	45
Tabel 4. 6 Jumlah Sekolah di Nagari Koto Tinggi	48
Tabel 4. 7 Data Sekolah di Nagari Koto Tinggi	49
Tabel 4. 8 Struktur Kelompok Tani Usaha Bersama	51
Tabel 4. 9 Anggota Kelompok Tani Usaha Bersama	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Produk UPPO kelompok Tani Usaha Bersama yang sudah masuk ke CV AJL	7
Gambar 1. 2 Grafik produksi pupuk organik kelompok Tani Usaha Bersama tahun 2017-2024	9
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Koto Tinggi	43
Gambar 4. 2 Gambar Kuadran Pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama	53
Gambar 4. 3 Surat rekomendasi penerima bantuan dan rekomendasi pencairan dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	56
Gambar 4. 4 Rumah kompos dan kandang ternak sesuai standar pusat	59
Gambar 4. 5 Surat Keterangan kelas Kelompok Tani Usaha Bersama	61
Gambar 4. 6 SK KTUB yang dikeluarkan oleh Pemerintah nagari	62
Gambar 4. 7 Kegiatan bimbingan teknis pembuatan pupuk oleh BPP Koto Besar ...	64
Gambar 4. 8 monitoring dan pengawasan pihak dinas pertanian di KTUB	67
Gambar 4. 9 Kegiatan monitoring penyuluh BPP di lokasi UPPO	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	143
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	147
Lampiran 3. Intrumen Wawancara	152
Lampiran 4. Intrumen Observasi	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien, termasuk pengelolaan limbah peternakan, untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti pupuk organik. Menurut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) berbasis biogas merupakan salah satu alternatif penting dalam mencapai swasembada pangan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber biogas memiliki kelayakan non-finansial yang kuat serta mendukung sistem pertanian berkelanjutan (Halimah et al., 2024).

Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2016, program UPPO bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik di tingkat petani dan mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. Dengan demikian, keberadaan UPPO tidak hanya mendukung pertanian berkelanjutan, tetapi juga membantu petani menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas secara lebih alami, sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan visi Kementerian Pertanian untuk mencapai pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Dharmasraya mencapai 30.063 rumah tangga, tersebar di 11

kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.665 merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya lokal seperti produksi pupuk organik. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk memberdayakan petani melalui pembentukan kelompok tani yang terorganisir guna mendukung keberlanjutan pertanian berkelanjutan. Salah satu bentuk upaya nyata yang dilakukan adalah melalui Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang dilaksanakan mengacu pada regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya mengimplementasikan program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) sebagai salah satu program strategis dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, S.Si., M.M., melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Agustus 2017, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan di sektor pangan dan hortikultura. Bantuan yang diberikan mencakup pengadaan sapi, pembangunan fasilitas kandang, rumah kompos, serta penyediaan obat-obatan penunjang, yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung proses produksi pupuk organik oleh petani secara mandiri.

Pelaksanaan program UPPO di Kabupaten Dharmasraya mencakup pemberian bantuan kepada tiga kelompok tani yang dinilai memiliki potensi dalam mengelola

pupuk organik berbasis limbah peternakan. Kelompok Tani Usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi merupakan salah satu penerima program tersebut, bersama dengan Kelompok Tani Tabiang Tinggi di Koto Besar dan Kelompok Tani di Koto Baru. Masing-masing kelompok memperoleh dana yang digunakan untuk pengembangan sarana produksi pupuk organik. Intervensi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi biaya produksi pertanian, meningkatkan kesuburan tanah, serta memperkuat sistem pertanian terpadu yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan pelaksanaan program UPPO serta tahapan pencairan dana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Kelompok Tani Nomor 294/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/04/2016 tanggal 5 April 2016, Kelompok Tani Usaha Bersama memperoleh bantuan dana melalui empat tahap pencairan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Pencairan dana UPPO kelompok Tani Usaha Bersama

Tanggal	Tahapan	Jumlah Persen	Nominal
26 Juli 2016	Termyn 1	28%	77.000.000
4 Oktober 2016	Termyn 2	21%	57.750.000
25 Oktober 2016	Termyn 3	21%	57.750.000
28 November 2016	Termyn 4	30%	82.500.000
Total			275.000.000

Sumber data : Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama

Kelompok Tani Usaha Bersama merupakan salah satu terobosan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Nagari Koto Tinggi. Kelompok ini menerima bantuan program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2016. Kegiatan utama kelompok ini adalah mengolah

limbah ternak, seperti kotoran dan urine sapi, menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Program ini bertujuan untuk membantu petani mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan menekan biaya produksi. Selain itu, kelompok ini juga berperan penting dalam mengembangkan potensi lokal dan mendorong kemandirian petani. Namun, dalam pelaksanaannya, kelompok ini masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya keterlibatan anggota, minimnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya strategi pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak agar kelompok ini dapat berkembang dan terus berkontribusi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.

Pemberdayaan kelompok tani tidak hanya memerlukan dukungan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kapasitas anggota secara menyeluruh. Pelaksanaan pemberdayaan yang efektif menuntut adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penyuluh pertanian, dan pelaku usaha. Di Nagari Koto Tinggi, pemangku kepentingan yang berperan dalam proses pemberdayaan tersebut meliputi Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar, Pemerintah Nagari Koto Tinggi, serta sektor swasta seperti CV AJL (Agro Jujuhan Lestari)

Peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Dinas Pertanian memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan di bidang pertanian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas berperan menyusun visi, misi, serta perencanaan strategis pembangunan pertanian daerah, merumuskan kebijakan teknis, hingga melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung program-program pertanian. Hal ini juga termasuk dalam mendukung pengelolaan pupuk organik melalui program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Pertanian telah menyalurkan bantuan berupa pengadaan sapi, pembangunan kandang, rumah kompos, serta penyediaan obat-obatan kepada kelompok tani penerima. Namun, belum terdapat kebijakan baru terkait keberlanjutan UPPO itu sendiri.

Kedua, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, yaitu memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta memfasilitasi akses informasi dan teknologi pertanian. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar, yang seharusnya berperan penting dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik melalui pendampingan teknis dan pelatihan, masih menghadapi sejumlah kendala. Jumlah penyuluh yang terbatas membuat kegiatan penyuluhan hanya dilakukan dalam bentuk pemantauan singkat, sehingga tidak memberikan pembinaan yang mendalam. Pergantian koordinator BPP juga berdampak pada berkurangnya intensitas dan kualitas pendampingan dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, pelatihan yang diberikan hanya terbatas pada tahap awal pembuatan pupuk organik, tanpa ada pelatihan lanjutan mengenai manajemen, pengemasan, maupun pemasaran..

Ketiga, Peran Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan kelompok tani diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, yang pada Pasal 6 ayat (2) menegaskan kewenangan nagari dalam penyelenggaraan urusan berbasis potensi lokal, termasuk bidang pertanian. Regulasi ini menempatkan Wali Nagari pada posisi strategis untuk mengesahkan kelembagaan kelompok tani dan mendukung program pertanian. Namun, dalam praktiknya, hingga kini belum ada program nagari yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani. Permasalahan semakin tampak setelah terjadinya pergantian Wali Nagari, di mana perhatian pemerintah nagari tidak lagi berfokus pada kelompok, sehingga peran nagari dalam mendukung keberlanjutan pupuk organik menjadi terbatas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Wali Nagari Koto Tinggi bapak Hendri, dijelaskan bahwa :

“...belum terdapat program khusus nagari terkait pemberdayaan kelompok tani yang ada di nagari dan hingga saat ini nagari hanya sebagai penyalur bantuan dari pusat maupun pemerintan daerah terkait bantuan seperti bibit tanaman buah buahan dan tanaman obat yang disalurkan kepada individu dan ibu ibu PKK .”(4 februari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan kelompok tani masih sangat terbatas. Fungsi nagari saat ini lebih berfokus sebagai penyalur bantuan, bukan sebagai penggerak atau fasilitator utama dalam pengembangan kapasitas kelompok tani. Kondisi ini berdampak pada minimnya dukungan kelembagaan di tingkat lokal yang seharusnya menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan program pemberdayaan petani. Akibatnya, kelompok tani tidak

memperoleh pendampingan teknis dan kelembagaan yang memadai untuk memperkuat kemandirian dan daya saingnya.

Keempat, sektor swasta seperti CV AJL (Agro Jujuhan Lestari) sebagai mitra usaha mencerminkan prinsip kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Regulasi-regulasi ini menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani yang berkelanjutan. CV AJL (Agro Jujuhan Lestari) sebagai mitra swasta berkontribusi dalam pemasaran dengan menjadi pembeli tetap pupuk organik, namun belum mendukung aspek branding dan perluasan akses pasar digital.

Gambar 1. 1 Produk UPPO kelompok Tani Usaha Bersama yang sudah masuk ke CV AJL



Sumber : Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama

Minimnya peran dinas pertanian, penyuluh pertanian, pemerintah nagari dan mitra usaha dapat menyebabkan lemahnya kelembagaan kelompok, rendahnya keterampilan anggota dalam produksi pupuk organik, serta stagnasi dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Akibatnya, kelompok akan kesulitan untuk bertahan dan berkembang, biaya

produksi menjadi tinggi karena tidak adanya pendampingan teknis yang memadai, dan produktivitas pupuk organik akan terus menurun seiring rendahnya partisipasi anggota. Dampak ini juga berpotensi mematahkan semangat petani untuk beralih ke pertanian organik, sehingga upaya mendukung pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah ternak menjadi terhambat di tingkat nagari.

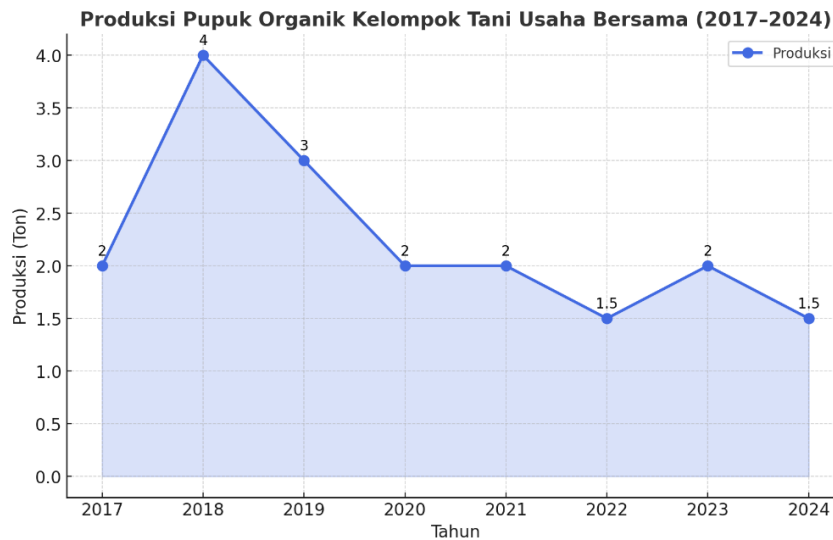
Pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh para pemangku kepentingan masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari beberapa permasalahan yang dihadapi kelompok, seperti penurunan produksi pupuk organik akibat terbatasnya permintaan pasar, rendahnya kemampuan teknis anggota dalam proses produksi, serta minimnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pihak terkait. Selain itu, tidak adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan setelah bantuan awal diberikan turut menyebabkan stagnasi kinerja kelompok. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan belum maksimalnya sinergi antar pemangku kepentingan juga memperlemah efektivitas program pemberdayaan yang seharusnya dapat mendukung keberlanjutan usaha pertanian organik.

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Mauludin selaku Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama, dijelaskan bahwa :

“...Dari 20 anggota yang terdaftar, sekarang paling cuma 5 orang aja yang benar-benar aktif sampai 2025. Akibatnya produksi pupuk organik juga turun lebih dari 50% dibanding tahun-tahun awal program. Ya wajar sih, soalnya cuma sedikit yang aktif, jadi kegiatan kelompok nggak bisa maksimal.”(5 februari 2025)

Hasil wawancara ini diperkuat dengan data produksi pupuk kelompok tani usaha bersama dari tahun 2017 hingga tahun 2024

Gambar 1. 2 Grafik produksi pupuk organik kelompok Tani Usaha Bersama tahun 2017-2024



Sumber: Sekretaris kelompok tani usaha bersama

Berdasarkan wawancara dengan Mauludin selaku Sekretaris Kelompok Tani Usaha Bersama, terungkap bahwa dari 20 anggota yang terdaftar, hanya 5 orang yang masih aktif hingga tahun 2025. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan produksi pupuk organik lebih dari 50% dibandingkan tahun-tahun awal program, sebagaimana tergambar dalam grafik produksi pupuk organik periode 2017–2024. Grafik tersebut menunjukkan bahwa produksi yang sempat mencapai puncak 4 ton pada tahun 2018 terus menurun hingga hanya sekitar 1,5 ton pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan anggota, minimnya pelatihan lanjutan, serta belum adanya strategi pemasaran yang memadai, misalnya branding produk, logo kemasan, maupun promosi digital. Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi penulis pada awal 2025, yang memperlihatkan bahwa peran sebagian besar pemangku

kepentingan belum terlaksana secara maksimal, ditambah dengan ketiadaan program pemberdayaan dari pemerintah nagari pasca pergantian kepemimpinan.

Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan produksi pupuk organik yang mendukung pertanian ramah lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan keterlibatan semua pihak untuk mendorong keberhasilan program secara menyeluruh. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap implementasi peran pemangku kepentingan mencakup pemerintah nagari, dinas pertanian kabupaten, lembaga penyuluhan dan pelatihan (BPP), serta mitra swasta dalam konteks keberlanjutan produksi pupuk organik di tingkat lokal, bukan hanya aspek teknis pembuatan pupuk. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pelatihan pembuatan pupuk organik atau pemanfaatan limbah organik tanpa mengkaji secara holistik dimensi kelembagaan dan pemasaran, seperti Pemberdayaan petani lokal melalui pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati kepada kelompok tani Suku Meyah yang menyajikan pelatihan teknis pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati kepada kelompok tani Suku Meyah (Supriyadi et al.,2024) Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perumusan kebijakan pemberdayaan kelompok tani serta mengidentifikasi faktor kelembagaan dan pemasaran yang masih kurang optimal di lapangan.

Berdasarkan jabaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI USAHA**

BERSAMA UNTUK KEBERLANJUTAN PRODUKSI PUPUK ORGANIK DI NAGARI KOTO TINGGI.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi, sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi anggota dalam Kelompok Tani Usaha Bersama masih sangat rendah, yaitu hanya lima dari dua puluh anggota yang aktif terlibat dalam kegiatan kelompok.
2. Pemerintah nagari belum secara aktif menyediakan atau memfasilitasi program pemberdayaan kepada kelompok tani dalam hal penguatan kelompok dan pengelolaan pupuk organik. serta belum terdapat Koordinasi dan kolaborasi antara Wali Nagari dengan pihak lain seperti penyuluh, dinas terkait, atau pihak swasta dalam pemberdayaan kelompok tani masih belum terbangun dengan baik
3. Penyuluhan yang diberikan oleh BPP dilakukan secara terbatas dan hanya mencakup informasi mengenai kegiatan penyuluhan yang diadakan di luar kota. Selain itu, belum ada kegiatan penyuluhan yang terjadwal secara rutin, maupun pemantauan terhadap hasil penyuluhan yang telah dilaksanakan terkait program UPPO bagi kelompok tani usaha bersama
4. Dinas Pertanian telah menyalurkan bantuan berupa pengadaan sapi, pembangunan kandang, rumah kompos, serta penyediaan obat-obatan kepada kelompok tani

penerima. Namun, pelaksanaan program ini belum disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

5. CV AJL (Agro Jujuhan Lestari) sebagai mitra swasta berkontribusi dalam pemasaran dengan menjadi pembeli tetap pupuk organik, namun belum mendukung aspek branding dan perluasan akses pasar digital

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka dibataskan dan di fokuskan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menelaah keterlibatan Pemerintah Nagari Koto Tinggi dalam mendukung Kelompok tani usaha bersama, khususnya terkait penguatan kelompok tani serta program pemberdayaan yang dilaksanakan
2. Peneliti membatasi kajian terhadap peran BPP kecamatan Koto Besar dalam memberikan penyuluhan terhadap kelompok tani usaha bersama
3. Penelitian membahas peran Dinas Pertanian kabupaten Dharmasraya dalam memberikan dukungan berupa Penyaluran bantuan UPPO serta bentuk monitoring terhadap kelompok tani usaha Bersama.
4. Penelitian membatasi kajian terhadap peran CV AJL sebagai konsumen tetap dan pihak yang mendukung perluasan pemasaran digital

D. Rumusan Masalah

Berikut Rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat peranan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan jabaran rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan peranan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi
2. Menganalisis faktor pendukung dan factor penghambat peranan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kelompok tani usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang sudah disebutkan, dapat ditarik manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman dan keilmuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian pemberdayaan Masyarakat oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Instansi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani, khususnya dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik melalui sinergi antarpihak
- b. Masyarakat dan kelompok tani, diharapkan dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peran pemangku kepentingan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, teknis, dan pemasaran hasil produksi.
- c. Peneliti atau pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan awal bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai peran stakeholder dalam pemberdayaan kelompok tani dan pengembangan pertanian organik berbasis komunitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi dalam mendukung produksi pupuk organik. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi keberlanjutan produksi pupuk organik, kontribusi yang paling dominan dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk jangka panjang, serta Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar melalui pelatihan dan penyuluhan kepada anggota kelompok. Keduanya menjadi aktor utama yang menjaga kesinambungan produksi pupuk organik meskipun kelompok masih menghadapi berbagai kendala.
2. Faktor pendukung pemberdayaan kelompok tani antara lain adanya bantuan sarana prasarana (seperti rumah kompos, kandang ternak, dan mesin pengolah pupuk organik), dukungan penyuluhan, serta legitimasi administratif yang memperkuat keberadaan kelompok. Bantuan ini memberi modal awal bagi kelompok untuk menjalankan usaha pupuk organik. Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat, seperti tidak adanya program lanjutan setelah bantuan awal, lemahnya pendampingan berkelanjutan, rendahnya partisipasi anggota, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta terbatasnya peran pihak swasta

yang hanya terlibat dalam transaksi jual-beli. Hambatan ini membuat keberlanjutan produksi pupuk organik sulit tercapai, sehingga kelompok masih berada pada tahap bertahan hidup, belum mampu berkembang lebih jauh.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat meningkatkan perannya masing-masing dalam mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan dan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan kelompok tani, seperti penyusunan regulasi di tingkat nagari, penguatan program pendampingan teknis dari BPP, keberlanjutan bantuan dari Dinas Pertanian, serta keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pemasaran dan pengembangan usaha. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada tahap awal, tetapi mampu menjamin keberlanjutan usaha pupuk organik.
2. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto Besar mampu memperoleh dan mengelola anggaran untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB). Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi melalui skema pinjaman modal usaha, serta memperluas kemitraan dengan pihak swasta yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar dukungan finansial maupun nonfinansial dapat terus berlanjut.

3. Bagi Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan partisipasi dengan membangun jaringan dan komunitas usaha yang memungkinkan anggota kelompok berbagi pengalaman, keterampilan, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kelompok tidak hanya bergantung pada dukungan pihak luar, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha pupuk organik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, R., Yulida, R., & Elza, S. (2021). Peran kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Agriculture*, 32(2), 76–88. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/agriculture/article/view/6426>
- Afriansyah, dkk. (2023). *Pemberdayaan masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Al Hikam, M. H., & Rahmadanik, D. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2), 55–65.
- Aminah, S., & Syafri, A. (2023). Agricultural extension strategies for sustainable farming: A case study in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 20(1), 45–58.
- Ananda, R. (2022). Dinamika Kepemimpinan dan Keberlanjutan Program Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 10(2), 145–158.
- Ardiansyah, A., & Susilowati, R. (2022). Kemitraan Usaha Tani Sayuran: Keseimbangan Hak dan Kewajiban Petani dengan Swasta. *Jurnal Agriekonomika*, 11(2), 187–198. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/12639>
- Arum, N. W. (2021). Partisipasi Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan GAPOKTAN di Desa Singosari, Boyolali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Sains (JISS)*.
- Astuti, T., & Hidayati, N. (2023). Model Kemitraan Agribisnis Berbasis Kontrak dalam Penguatan Rantai Nilai Petani Hortikultura. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 45–57. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/view/46447>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2024).
- Belinder, D. (2025). Agricultural extension services as facilitators of sustainable development. *Journal of Rural Studies*, 109, 123–135.
- Benoto, K., Marfuah, L. A., & Kurniawan, M. I. (2024). Peranan Dinas Pertanian Jampang Kulon dalam Memberdayakan Kelompok Tani. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2).
- BPS & Ditjen PSP. (2023). *Statistik Pertanian Organik Indonesia*
- Bupati Dharmasraya. (2016). *Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya*. Dharmasraya: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

- Dewi, I. P., Utami, D., & Susanti, H. (2023). Motivasi Penyuluh dan Dampaknya terhadap Partisipasi Kelompok Tani. *Jurnal Agrisocionomics*.
- Ditjen PSP. (2022). Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian 2018–2022. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Eriyanti, F. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir (Suatu tinjauan relevansi faktor pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir). PT RajaGrafindo Persada.
- Faozanudin, M., dkk. (2022). Pemberdayaan masyarakat: Dialektika partisipasi publik dan pembangunan. Banyumas: SIP Publishing.
- Fatirahma, N. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 35–45. <https://doi.org/10.1234/jip.2020.12.1.35>
- Fibrianiingtyas, R., Setyawati, S., & Nuraini, H. (2022). Peran fasilitator lokal dalam pemberdayaan komunitas pertanian. *Jurnal Penyuluhan Pertanian Indonesia*, 17(2), 101–115.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata Siosar. *Perspektif*, 11(1), 8–15.
- Halimah, A. S., Darma, D., & Akhnaniyanti, A. (2024). Non-Financial Feasibility Analysis on The Utilization of Cattle Livestock Waste as a Biogas. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/10.23969/jcbeem.v8i1.11152>
- Hamidah, N., & Rahmawati, D. (2022). Sinergi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat pertanian. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 17(2), 101–113.
- Hapsari, A. D. (2021). Strategi percepatan program pemberdayaan petani melalui inovasi kebijakan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 55–69.
- Hardiyani, E., Sari, S., & Rasyid, R. (2021). Tingkat partisipasi kelompok tani/ternak dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan di Kelurahan Soreang, Kabupaten Maros. *Jurnal Peternakan*.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan perempuan (Studi kasus Desa Lamamek, Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).
- Heriyadi, H., Billah, T., & Dayat. (2020). Tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam penyusunan ROK dan RDKK. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, Polbangtan Bogor.

- Hermawan, I., Suharmanto, S., Hindrawati, G., Sartono, S., Inayah, I., & Rahmawati, L. (2024). The empowerment of Sukoharjo magpie breeders in the role of strengthening production capacity and financial system management. *International Journal of Research and Community Empowerment*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.58706/ijorce.v2n1.p14-23>
- Hermanu, B., Nurlaili, E. P., Jonathan, Kristiani, M., & Mandasari, M. (2023). Penyuluhan legalitas produk PIRT dan keamanan pangan bagi kelompok wanita tani di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 1–13.
- Hidayat, T. (2021). Monitoring dan evaluasi program penyuluhan pertanian: Tantangan dan strategi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(1), 1–13.
- Hidayaturrahman, M., dkk. (2020). Teori sosial empirik: Untuk penelitian ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi). Malang: Edulitera.
- Hisyam, M., Putri, N. A., & Nazaki. (2021). Peran Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Dompok. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 135-143.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imanda, N., & Setiawati, D. (2024). Hubungan antara metode penyuluhan dengan partisipasi peserta pada penyuluhan kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Forum Ekonomi (JFE) UNP*.
- Irfan, M., & Pratama, Y. A. (2021). Pelibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata kebun kelulut Sangatta Selatan (Studi kasus PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Asset 5 Sangatta Field). *Share: Social Work Journal*, 11(2), 131–144.
- Izudin, A., & Fittaqiya, S. (2024). Building collaboration, solidarity, and empowerment for enterprise actors in Yogyakarta City, Indonesia: Towards an adaptation of digital platforms. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 4(1), 51–66. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2024.4.1.20063>
- Jannata, F. M., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 762–776.
- Jusriadi, J., Farid, F., Marsanda, M., Irma, A., & Tobigo, H. (2024). Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam mendukung pencapaian kegiatan ekonomi di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 85–94.

- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kusumatantya, I. (2013). Peran pemangku kepentingan dalam pembentukan komunitas guna mencapai ketahanan sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), 33–48.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Alfabeta.
- Magfira, N., Rahman, M., & Nurhayati, A. (2025). Peran penyuluh pertanian terhadap pengembangan kelompok tani padi di Desa Padang, Kecamatan Gantarang. *Jurnal Agricore*, 7(1), 55–70. Universitas Padjadjaran.
- Mediasosian. (2022). Evaluasi program pemberdayaan petani dengan model CIPP. *Unik Kediri Journal of Social Sciences*, 6(2), 112–123. Universitas Kadiri.
- Mohamad Alam Setiawan, Pribadi, T. I. (2024). Peran Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(7), 305–316.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawangsari, E. R., Susanti, N., & Arifin, Z. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2021>
- Nik, N., & Rusae, A. (2023). Pendampingan kelompok tani dalam budidaya tanaman hortikultura berbasis organik di Desa Sallu. *Jurnal Pengabdian, Universitas Pahlawan*.
- Novitasari, A. T. (2022). Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Era Digital melalui UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(1), 22–36. <https://doi.org/10.22219/jebd.v5i1.2022>
- Nuridin, N., Arifin, Z., & Rahmat, R. (2025). Peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kapasitas kelompok tani di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 17(1), 45–57. Universitas Muhammadiyah Sinjai. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/960>
- Nurmalia, N., dkk. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi anggota kelompok dan dampaknya terhadap perkembangan usaha perikanan. *Jurnal Perikanan & Kelautan (JPPIK)*.
- Oktaviani, D. A. (2023b). Peran penyuluh pertanian terhadap pengembangan kelompok tani padi di Desa Padang, Kecamatan Gantarang. *Jurnal Agricore*, Universitas Padjadjaran.

- Ouerghemmi, W., Leclercq, C., & Martin, B. (2024). Farmer organizations as facilitators of agricultural innovation: Evidence from global south. *World Development*, 171, 106232.
- Parsons, W. (2008). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, H. (2021). Koordinasi antar lembaga teknis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia*, 13(1), 77–91.
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari*. Dharmasraya: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- Putri, R., Zulham, A., & Ramadhan, H. (2023). Intensitas pendampingan penyuluh terhadap produktivitas petani sayuran di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian Nusantara*, 12(2), 98–110.
- Rahman, A., & Putra, B. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Koordinasi Program Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(1), 56–69.
- Rahmawati, A., & Kurniawan, E. (2022). Pengaruh pendampingan teknis terhadap keterampilan pengolahan pupuk organik. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(1), 77–85.
- Rahayu, D., Santosa, B., & Yuliani, R. (2021). Efektivitas Bantuan Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Kelompok Tani. *Jurnal Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, 17(2), 145–158.
- Rahayu, S., Prasetyo, Y., & Haryanto, T. (2021). Efektivitas bantuan alat mesin pertanian di Jawa Tengah: Antara optimalisasi dan tantangan pemeliharaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 17(2), 101–115.
- Santosa, D., & Wahyuni, S. (2023). Peran sektor swasta dalam pemberdayaan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Agribisnis Indonesia*, 7(1), 112–126.
- Saraan, M., & Rambe, A. (2023). Teknologi ramah lingkungan dalam peningkatan efisiensi dan kualitas produk pertanian presisi. *Jurnal Teknologi Pertanian Berkelanjutan*, 5(1), 12–25.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sola, O. (2018). Decision-making and organizational performance: A theoretical framework. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(4), 205–215. <https://doi.org/10.18646/2056.54.18-015>
- Sugiarti, E., & Yulandari, A. (2024). Penguatan solidaritas sosial melalui pengelolaan pupuk organik berbasis limbah ternak. *Jurnal Pembangunan dan Agribisnis Berkelanjutan*, 9(2), 77–90.

- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhendri, Hendrik, Dito Aditia, & Cakti Indra Gunawan. (2025). Peran stakeholder dalam mendukung ketahanan mangrove berkelanjutan di Banyuurip Mangrove Center, Jawa Timur. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(2), 279–290.
- Supriyadi, Y., Sagrim, M., & Katili, J. (2024). *Pemberdayaan petani lokal melalui pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati kepada kelompok tani Suku Meyah*. Igkojei: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 2(1), 1–5.
- Susilowati, R. (2021). Akses pasar dan keberlanjutan usaha tani di pedesaan. *Indonesian Journal of Agricultural Social and Communication*, 3(2), 101–113. <https://jurnal.uns.ac.id/ijasc/article/view/54407>
- Utomo, I. S., Siswadi, S., & Sitorus, A. P. M. C. (2025). Sosialisasi pentingnya legalitas tanah pada implementasi ISPO di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(3), 3738–3745.
- Widiyanto, B., dkk. (2024). Maggot cultivation assistance in Loireng Village, Demak with practitioners from the Panata Bumi Waste Bank. *ASEAN Journal of Empowerment Community*, 4(1), 31–41.
- Wijayanti, D. M., Djumiarti, T., & Dwimawanti, I. H. (2024). Analisis peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 1297–1310.
- Yanti, M., Damanik, E., & Far Far, M. (2025). The role of agricultural extension in farmer group dynamics. *Jurnal Agrisep*, 24(1), 77–89.
- Yuzianah, D., Maryam, I., Zulfanita, & Harianto, E. (2024). Legalitas usaha kelompok wanita tani. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 240–2